BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi dalam perannya begitu penting dalam mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu negara. Suatu hasil nyata dari kebijakan pembangunan yang telah terlaksana menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi (Windayana & Darsana, 2020). Pertumbuhan ekonomi saling berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang apabila terjadi peningkatan maka akan mengikuti begitu pula sebaliknya. Pembangunan ekonomi merupakan upaya untuk menaikkan taraf hidup masyarakat, menambah angkatan kerja dan pemerataan pendapatan langsung yang diukur dengan tingkat pendapatan riil perkapita (Wihastuti & Rahmatullah, 2018). Pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu negara dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi di tiap daerah serta penduduk dari masing - masing daerah tersebut. Pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari peran manusia dalam pengelolaannya yang dimana manusia adalah tenaga kerja, input pembangunan dan juga konsumen utama dari hasil pembangunan. Maka dalam pembangunan ekonomi di tiap daerah perlunya melakukan pengelolaan sumber daya oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk mewujudkan perluasan dan peningkatan peluang kerja bagi masyarakat.

Pembangunan suatu daerah berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia dan juga tenaga kerja yang ada dalam daerah tersebut. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor keberhasilan yang penting dalam proses pembangunan

ekonomi dimana penyerapan tenaga kerja mendorong pembangunan daerah secara keseluruhan. Salah satu permasalahan yang masih dihadapi oleh masyarakat paling banyak adalah masalah ketenagakerjaan yaitu kesempatan kerja masih kurang dan terbatas. Yang menjadi salah satu faktor penyebab ketidakseimbangan antara kesediaan dan kebutuhan tenaga kerja yaitu faktor pertumbuhan ekonomi belum sejalan dengan daya serap tenaga kerja yang memadai (BPS, 2021). Sedangkan keberhasilan sebuah pemerintahan salah satunya dilihat dari seberapa jauh pemerintahan tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Permasalahan tenaga kerja ini semakin bertambah dengan adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa perusahaan mengurangi tenaga kerja akibat daya beli masyarakat menurun. Pada periode tahun 2019 – 2021 selama sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi banyaknya pengurangan tenaga kerja membuat angka pengangguran meningkat. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan kesempatan kerja dengan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi dan dapat mengurangi tingkat pengangguran pada suatu daerah.

Indikator ketenagakerjaan menurut BPS Jawa Timur menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang positif dimana penduduk dengan usia kerja juga terus bertambah. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Timur memiliki banyak penduduk usia kerja bertambah dengan lapangan pekerjaan terbatas yang menjadi masalah pengangguran dalam pembangunan. Menurunnya tingkat pengangguran diikuti dengan meningkatnya jumlah penduduk yang telah memasuki usia angkatan kerja membuat persaingan mendapat pekerjaan semakin sulit. Apabila penduduk yang telah memasuki usia kerja masih belum mendapatkan pekerjaan maka akan

menambah angka pengangguran, sehingga sudah seharusnya pemerintah menambah lapangan pekerjaan agar tingkat pengangguran tidak semakin tinggi. Pengangguran dapat menjadi dampak pada ketidakseimbangan ekonomi dan aspek lainnya pada daerah tersebut.

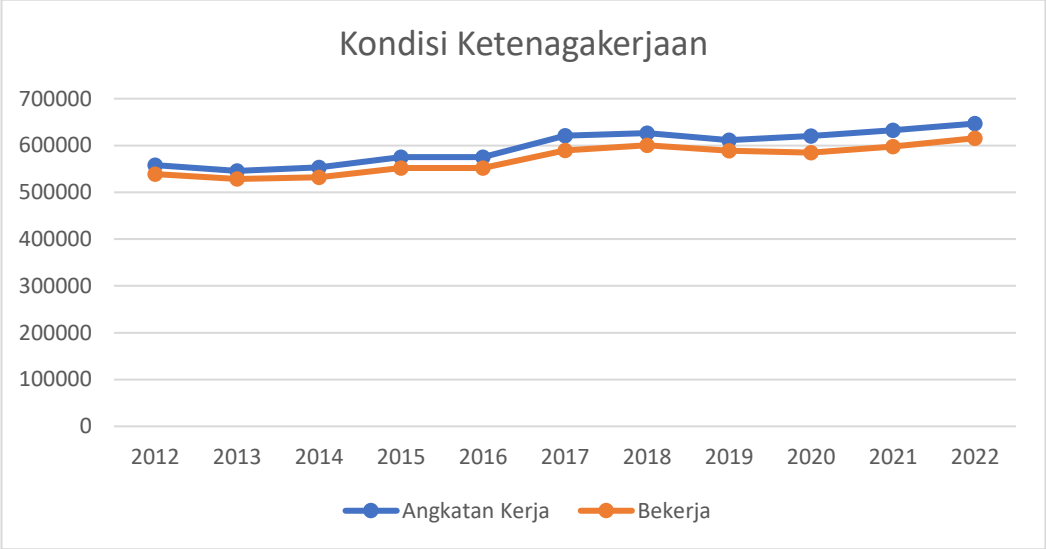

Gambar 1.1 Kondisi Ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto 2012 – 2022

Sumber : BPS, data diolah

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak potensi pengembangan wilayah diberbagai bidang seperti industri yaitu Kawasan Industri Ngoro dan Jetis. Tidak hanya industri tetapi Kabupaten Mojokerto memiliki banyak tempat pariwisata yang dapat mendukung kemajuan perekonomian. Perekonomian di Kabupaten Mojokerto banyak membutuhkan ketenagakerjaan yang mendukung peningkatan pengembangan industri serta pariwisata. Penyerapan tenaga kerja yang timbul dari upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja ditentukan oleh pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja. Berdasarkan grafik diatas menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Mojokerto yang mengalami fluktuasi. Meningkatnya jumlah angkatan

kerja yang cukup tinggi menjadi masalah ketenagakerjaan yang masih dihadapi Kabupaten Mojokerto karena tidak disertai dengan daya serap tenaga kerja yang seimbang. Perluasan kesempatan kerja di Kabupaten Mojokerto harus ditingkatkan karena angkatan kerja terus mengalami peningkatan. Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2019 turun menjadi 588.987, kemudian pada tahun 2019 hingga 2020 angka tenaga kerja turun menjadi 584.689 lalu kembali mengalami peningkatan angka tenaga kerja pada tahun 2021 menjadi 597.775 dan tahun 2022 sebesar 615.557 yang menunjukkan sebagian besar penduduk telah bekerja dan hanya sebagian penduduk yang masih pengangguran atau sedang mencari pekerjaan. Dengan Kabupaten Mojokerto memiliki nilai TPAK pada 2022 sebesar 71,34% yang meningkat sebesar 0.87% dibandingkan dengan tahun 2021 berarti akan semakin meningkat pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa angkatan kerja pada tahun 2021-2022 telah mengalami pemulihan pasca pandemi Covid-19 dimana perekonomian mulai kembali membaik salah satunya ditunjukkan dengan peningkatan pada tenaga kerja.

Dalam penyerapan tenaga kerja dibutuhkan kualitas dalam sumber daya manusia maka dari itu pendidikan juga penting. Dengan adanya pendidikan maka tenaga kerja yang terserap memiliki pengetahuan dan potensi dalam pengembangan suatu perusahaan. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi produktivitas kerjanya. Karena dengan pendidikan tersebut, seseorang memiliki modal untuk tampil produktif pada pekerjaan yang memenuhi kriteria dan diinginkan oleh

perusahaan (Rahayu, 2020). Pendidikan menjadi salah satu standar dalam penyerapan tenaga kerja karena agar maksimal dalam potensi dan kemampuan yang dimiliki di perusahaan. Ketersediaan lapangan pekerjaan terkadang tidak sesuai dengan kemampuan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang maka dari itu pendidikan digunakan sebagai salah satu acuan dalam penerimaan tenaga kerja. Walaupun banyak yang telah menempuh pendidikan tinggi tetapi dalam suatu perusahaan lebih mengutamakan pengalaman atau skill yang dimiliki sedangkan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keinginan pencari kerja. Namun dengan pendidikan yang dimiliki dapat menjadikan sumber daya manusia yang terserap menjadi tenaga kerja berkualitas. Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan banyaknya orang yang telah memiliki pendidikan tinggi maka dari itu perlunya perluasan dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Mojokerto selama empat tahun terakhir pada tahun 2019 – 2022 menjadi salah satu pengaruh dalam penyerapan tenaga kerja. Dengan sebagian besar penduduk Kabupaten Mojokerto yang didominasi oleh penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) sekitar 70 persen dalam periode 2019 – 2022 tersebut. Jumlah penduduk Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sebagian besar usia produktif memiliki pengaruh besar terhadap penyerapan tenaga kerja yang diperlukan karena penduduk dengan usia produktif yang telah memiliki pekerjaan dapat mengurangi angka pengangguran. Maka penduduk yang telah siap untuk bekerja harus diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai agar terjadi pemerataan penduduk.

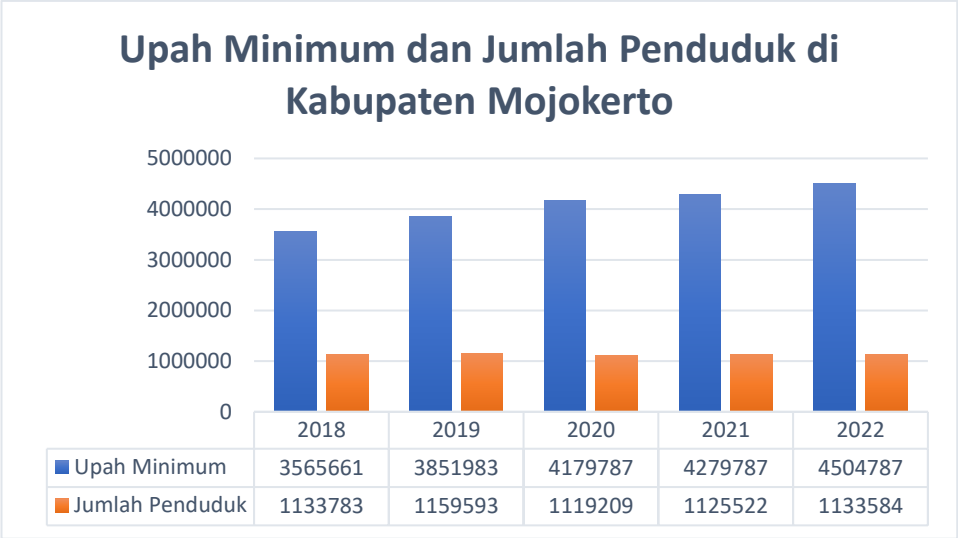

Gambar 1.2 Upah Minimum dan Jumlah Penduduk di Kabupaten Mojokerto

Sumber : BPS, data diolah

Dapat dilihat dari grafik tersebut jumlah penduduk dari Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan sebanyak 25.810 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami penurunan jumlah penduduk sebanyak 40.384 jiwa. Jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan karena banyak penduduk yang menderita sakit dan meninggal dunia akibat terdampak oleh virus Covid-19. Pada tahun 2021 hingga 2022 kembali mengalami peningkatan sebanyak 8.062 jiwa. Dengan peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan angkatan kerja menjadi meningkat pula. Maka dari itu pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang baru agar pertambahan penduduk dapat menjadi pengaruh positif bagi penyerapan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Mojokerto dapat menurun.

Dalam mendorong penyerapan tenaga kerja tentunya juga berkaitan erat dengan upah yang diberikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tahun 1999 tentang upah minimum menyebutkan bahwa dalam rangka upaya mewujudkan

penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas dan kemajuan perusahaan serta perkembangan perekonomian pada umumnya. Salah satu upaya untuk mendorong tenaga kerja aktif dalam perekonomian yaitu dengan kebijakan upah minimum. Setiap tenaga kerja yang melakukan pekerjaan purna waktu maupun paruh waktu akan memperoleh timbal balik atau imbalan dalam bentuk upah/gaji atas keikutsertaannya dalam perekonomian (Oleh, 2019). Upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto yaitu terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dapat diketahui bahwa sejak 2018 hingga 2019 meningkat sebesar Rp 286.322 kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 327.804 pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp 100.000 dan pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp 225.000. Dengan adanya peningkatan setiap tahun pada upah minimum kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto menerapkan peraturan sesuai perundang – undangan yang berlaku tentang tenaga kerja dan menginginkan masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan juga mendapat kesejahteraan dalam hidupnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang masalah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto dan mengkaji lebih dalam lagi dengan mengangkat judul **“ANALISIS PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK), DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KABUPATEN MOJOKERTO”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dianalisis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Tingkat Pendidikan memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto ?
2. Apakah Upah Minimum Kabupaten memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto ?
3. Apakah Jumlah Penduduk memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum kabupaten terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup wilayah dalam penelitian ini adalah Kabupaten Mojokerto di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini mendeskripsikan faktor yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dengan metode kuantitatif deskriptif menggunakan data time series. Penelitian ini memperoleh data

sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mojokerto pada tahun 2007-2022.

Ruang lingkup dalam penelitian ini menganalisis tentang penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini menggunakan variabel rata – rata lama sekolah, upah minimum, dan jumlah penduduk sebagai variabel independent, dan variabel tenaga kerja sebagai dependen dalam pengukuran untuk mengetahui jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sehingga dapat berguna antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk pemerintah dalam menentukan kebijakan penyerapan tenaga kerja khususnya di pemerintahan Kabupaten Mojokerto
2. Dapat menambah informasi serta pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dan digunakan sebagai referensi kedepannya yang berkaitan dengan pengaruh pendidikan, upah minimum kabupaten dan jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Mojokerto.
3. Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki selama di perkuliahan.
4. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah kepada yang berkepentingan khususnya jurusan Ekonomi Pembangunan sebagai pembendaharaan referensi dan tambahan wacana dalam pelaksanaan penelitian lebih lanjut.